

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* dikembangkan oleh Freeman (1983) menjelaskan bahwa perusahaan tidak menjalankan aktivitasnya untuk diri sendiri tetapi juga memberikan manfaat kepada para *stakeholdernya* (Juniartha dan Dewi, 2017). Perusahaan menggunakan teori *stakeholder* sebagai acuan dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan membutuhkan peran dan dukungan dari para pemangku kepentingan untuk mempertahankan eksistensinya sehingga aktivitas perusahaan juga harus mempertimbangkan persetujuan dari para *stakeholder* (Gray et al, 1995). *Stakeholders* merupakan individu atau entitas yang berkaitan dengan kepentingan dan memiliki pengaruh terhadap jalannya perusahaan (Chanifah et al, 2019).

Peran *stakeholders* bagi kelangsungan hidup perusahaan secara berkelanjutan sangat penting karena dari *stakeholders* perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya. (Ghozali dan Chariri, 2007) berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat beroperasi sendiri tanpa dukungan dari para *stakeholders*. *Stakeholders* mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam aktivitas perusahaan. Selain itu, *stakeholder* juga berhak mendapatkan informasi dan memilih untuk berperan atau tidak berperan secara langsung dalam suatu perusahaan (Deegan, 2002).

Teori ini menitikberatkan pada pengawasan dan pemenuhan kebutuhan *stakeholder* oleh perusahaan. Karena keberadaan *stakeholder* mempengaruhi semua aktivitas perusahaan (Anthony dan Govindarajan, 2005). Salah satu pengaruhnya adalah *stakeholder* dapat mengendalikan pemakaian sumber ekonomi perusahaan. Namun, pengendalian itu ditentukan oleh seberapa besar kekuatan yang dimiliki *stakeholder* atas sumber ekonomi tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan agar aktivitas bisnis tetap berjalan lancar.

Dalam mengungkapkan tanggung jawab lingkungannya perusahaan perlu mempertimbangkan keberadaan *stakeholder*. Para pemangku kepentingan ini menjadi pertimbangan perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Karena *stakeholder* akan membantu manajemen dalam meningkatkan penciptaan nilai perusahaan. Pengungkapan lingkungan yang lengkap, transparan dan tidak memihak akan memberikan nilai lebih bagi para *stakeholder* mengenai bagaimana perusahaan mengelola tanggung jawabnya (Juniartha dan Dewi, 2017).

Teori *stakeholder* juga menjelaskan bagaimana keberadaan *stakeholder* diperlukan dalam menjalankan bisnis perusahaan (Bani-Khalid dan Kouhy, 2017). Orientasi perusahaan bergeser dari yang diorientasikan kepada *shareholder* (*shareholder orientation*) yang fokus hanya pada ukuran kinerja ekonomi ke arah kesinambungan lingkungan dan masyarakat dengan memperhatikan dampak lingkungan (Hadi, 2011). Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya keberadaan suatu

entitas merupakan perjanjian antara perusahaan dengan berbagai pihak (Jensen dan Meckling, 1976)

Interaksi antara *stakeholders* dengan perusahaan merupakan hubungan timbal balik. *Stakeholder* mempunyai kepentingan dan pandangan berbeda mengenai bagaimana menjalankan operasi perusahaan. Perusahaan berusaha melibatkan *stakeholder* dalam beberapa hal yang memerlukan persetujuan dari pihak tersebut (Indriastuti, 2012). Teori ini berhubungan dengan *environmental disclosure*, jika dukungan *stakeholders* kuat terhadap aktivitas perusahaan maka semakin tinggi pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan (Fashikhah dkk, 2018). Pengungkapan lingkungan dianggap sebagai bentuk komunikasi perusahaan dengan *stakeholder*.

2. Teori Legitimasi

Purnama (2018) mengungkapkan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam menganalisis perilaku organisasi dan menjadi dasar penentuan keberadaan perusahaan di masyarakat. Teori legitimasi menekankan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Sari dkk, 2019). Perusahaan berusaha melakukan penyesuaian dalam batas dan norma masyarakat. Karena batas dan norma tersebut mengalami perubahan seiring berjalannya waktu sehingga perusahaan harus kritis dalam melegitimasi masyarakat (Sutadipraja dkk, 2020).

Teori legitimasi menjelaskan bahwa tindakan perusahaan harus sejalan dengan perilaku sosial dalam masyarakat. Karena apabila perusahaan menunjukkan

perbedaan tindakan maka akan menyebabkan perusahaan kehilangan legitimasinya (Chanifah dkk, 2019). Hal tersebut dilakukan untuk kelangsungan hidup perusahaan yang lancar sehingga mendapatkan legitimasi masyarakat. Dengan demikian, perusahaan dapat menjadikan legitimasi sebagai dasar dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat (Putra dan Utami, 2017).

Menurut Juniarta dan Dewi (2017), teori legitimasi menyatakan adanya kontrak sosial yaitu perusahaan dapat memenuhi harapan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung agar perusahaan dapat mengetahui tindakan bagaimana yang seharusnya dilakukan. Ketika perusahaan gagal untuk memenuhi harapan tersebut maka perusahaan akan menerima sanksi berupa isu-isu sosial sehingga keberadaan perusahaan di masyarakat diragukan. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat melegitimasi masyarakat melalui berbagai aktivitas yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Teori legitimasi juga memberikan strategi pengungkapan yang dapat dilakukan perusahaan untuk melegitimasi keberadaannya secara empiris. Perusahaan dapat mengamati dan menentukan tindakan yang tepat untuk menjamin aktivitas perusahaan tidak melanggar aturan masyarakat. Selain itu, perusahaan akan secara sukarela mengungkapkan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berhubungan dengan harapan masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Dengan demikian, perusahaan akan melakukan pengungkapan lingkungan lebih banyak untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Noviani dan Suardana, 2019).

Legitimasi merupakan faktor penting bagi perusahaan untuk mengembangkan masa depan perusahaan. Hal yang berkaitan dengan etika bisnis,

kinerja karyawan, lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi fokus utama perusahaan dalam meningkatkan legitimasi. Perusahaan akan menunjukkan kepeduliannya dengan mengungkapkan informasi lingkungan secara luas sehingga keberadaan perusahaan dapat diterima oleh masyarakat (Oktafianti dan Rizki, 2015).

Teori legitimasi menyatakan bahwa *environmental disclosure* digunakan perusahaan sebagai bentuk jawaban atas tuntutan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap kinerja lingkungan yang dilakukan (Nurhayati dan Kurniati, 2019). Selain itu, perusahaan juga dapat memenuhi tuntutan tersebut dengan mempublikasikan dan melaporkan dalam laporan tahunan perusahaan. Dengan demikian, eksistensi perusahaan dapat tetap bertahan dalam jangka panjang (Fasikhah dkk, 2018).

3. *Environmental Disclosure*

Environmental disclosure adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai lingkungan hidup dalam laporan tahunan perusahaan (Dewi dan Yasa, 2017). *Environmental disclosure* merupakan suatu aktivitas lingkungan perusahaan yang diungkapkan sebagai informasi (Julekhah dan Rahmawati, 2019). Pengungkapan lingkungan dapat dilihat dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan. Informasi yang diungkapkan berupa beberapa item sesuai dengan standar yang digunakan perusahaan.

Environmental disclosure diukur dengan indeks GRI. Rahmawati dan Budiwati (2018) dalam penelitiannya menggunakan GRI-G4 untuk mengukur

variabel pengungkapan lingkungan yang membagi kategori lingkungan menjadi 12 aspek yaitu, bahan, energi, air, keanekaragaman hayati, efluen dan limbah, emisi, produk dan jasa, transportasi, kepatuhan, lain-lain, asesmen pemasok atas lingkungan dan mekanisme pengaduan masalah lingkungan. GRI digunakan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* atas *sustainability reporting* yang anal dan dapat dipercaya serta berguna untuk perusahaan dari berbagai ukuran, sektor dan lokasi sehingga pemakaiannya luas di seluruh dunia (Sutadipraja dkk, 2020).

Pengungkapan lingkungan hidup pada laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan dapat menjadi sarana masyarakat memantau semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya. Pentingnya pengungkapan informasi lingkungan berkaitan dengan adanya kontrak sosial. Kontrak sosial yang dimaksud adalah adanya perjanjian antara perusahaan dengan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dikarenakan interaksi perusahaan dengan lingkungan membuat perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada kesejahteraan pemegang saham tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yaitu tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan lingkungan hidup (Sari dkk, 2019).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK 04/2016 pasal 4 menyatakan bahwa dalam laporan tahunan wajib minimal memuat beberapa aktivitas yang dilaksanakan perusahaan serta tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap para pemangku kepentingan. Namun, peraturan tersebut tidak menjelaskan persyaratan tentang bentuk, format, maupun isi dalam laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan tidak adanya standar resmi

pelaporan lingkungan tersebut menyebabkan pengungkapan informasi lingkungan masih bersifat sukarela (*voluntary*). Jenis pengungkapan dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). Menurut Suhardjanto dan Miranti (2007) pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan standar disebut *mandatory disclosure*. Pengungkapan secara wajib/*mandatory* adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sari dkk, 2018).

Kegiatan operasional dan aktivitas perusahaan yang berdampak langsung terhadap lingkungan sebaiknya diungkapkan dalam tanggung jawab lingkungan. Pengungkapan lingkungan ini sebagai upaya perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dengan alam dan manusia (Noviani dan Suardana, 2019). Pengendalian polusi, penggunaan sumber daya ramah lingkungan dan penggunaan bahan produksi daur ulang merupakan beberapa aspek dalam menerapkan tanggung jawab lingkungan tersebut berkaitan dengan proses produksi. Sedangkan untuk aspek lingkungan yang berkaitan dengan pasca produksi diantaranya yaitu penetralan limbah sebelum dibuang ke lingkungan, penyegaran lingkungan hidup (reboisasi), pengemasan dan distribusi yang ramah lingkungan, aktif dalam pengelolaan lingkungan hijau (Juniartha dan Dewi, 2017).

Pengungkapan lingkungan menjadi isu penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan karena sebagai bahan pertimbangan investor. Pengungkapan lingkungan perusahaan juga berisi informasi mengenai data keuangan yang dihasilkan dari kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan

(Barthelot dan Magnan, 2017). Informasi lingkungan diungkapkan dalam rangka membangun atau mempertahankan legitimisasi perusahaan yaitu penerimaan masyarakat terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi harapan dan perubahan masyarakat. Jika perusahaan tidak sejalan dengan masyarakat maka kepercayaan terhadap perusahaan akan berkurang sehingga perusahaan perlu untuk melakukan penyesuaian antara kegiatan operasional dengan harapan masyarakat (Suttipun dan Stanton, 2012).

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan tingkat kepemilikan aset perusahaan yang berpengaruh pada pandangan pemerintah, *stakeholder* dan masyarakat terhadapnya. Perusahaan dengan aset yang besar akan semakin dikenal publik dan dituntut untuk melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Noviani dan Suardana, 2019). Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan dalam suatu periode tertentu (Paramitha dan Rohman, 2014). Besar kecilnya sebuah perusahaan dalam penelitian ditunjukkan dengan total aset dimana nantinya akan dinyatakan dalam logaritma natural total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Putra, 2017). Perusahaan besar juga memiliki dana yang besar sehingga masyarakat akan memandang perusahaan dapat melakukan pertanggungjawabannya dalam hal ini pertanggungjawaban lingkungan dengan baik dan diungkapkan pada laporan tahunannya (Arifianata dan Wahyudin, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 35 dan 36 menjelaskan kriteria ukuran perusahaan terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000.
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000.
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 1 menjelaskan bahwa Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh perusahaan dengan jumlah aset bersih lebih besar dari bisnis menengah. Indikator pengukuran ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan total aset, penjualan, total tenaga kerja, nilai kapitalisasi pasar (Suhardjanto, 2008), total modal (Yahya dkk, 2007), log e, nilai pasar saham, jumlah laba, beban pajak (Brigham dan Houston, 2010), nilai perusahaan (Subekti dkk, 2000).

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar dampak yang ditimbulkan oleh aktivitasnya. Berbagai dampak tersebut akan menarik perhatian publik yang menyebabkan perusahaan besar mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai lingkungan (Galani et al, 2011). Perusahaan dapat menjadikan pengungkapan lingkungan sebagai jawaban atas tekanan yang diberikan sehingga perusahaan tetap mendapatkan legitimasi dari pihak-pihak tersebut (Maulana dkk, 2021).

5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah tujuan utama perusahaan (Dewi dan Yasa, 2017). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba sehingga dapat meningkatkan nilai pemegang saham (Ijma dkk, 2019). Dalam satu periode perusahaan mampu menghasilkan laba dari berbagai kegiatannya. Perusahaan menghasilkan laba untuk menjaga eksistensinya kepada *stakeholder*.

Profitabilitas diukur dengan ROA. ROA merupakan kemampuan dari keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba (Ijma dkk, 2019). Profitabilitas diukur menggunakan rasio ROA yaitu membandingkan laba setelah pajak dengan total aset (Dewi dan Yasa, 2017). Menurut Darsono (2005), ROA perusahaan dapat menunjukkan apakah perusahaan efisien dalam menggunakan aktiva untuk kegiatan operasionalnya. Karena rasio profitabilitas juga dapat mengukur bagaimana perusahaan mengelola kekayaannya (Suhardjanto, 2010).

Menurut Brigham dan Houston (2010) menyatakan rasio untuk mengukur profitabilitas dapat melalui:

- a. *Gross Profit Margin*, yaitu rasio keuangan untuk menilai efisiensi proses produksi suatu produk yang dijual melalui perhitungan penjualan bersih dan harga pokok penjualan perusahaan.
- b. *Operating Profit Margin*, yaitu kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan yang dicapai perusahaan.
- c. *Net Profit Margin*, yaitu rasio keuangan yang membagi rasio laba terhadap pendapatan.
- d. *Return On Investment*, yaitu rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan dengan membandingkan rasio laba bersih terhadap biaya investasi.
- e. *Return On Equity*, yaitu rasio untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak.
- f. *Return On Common Stock Equity*, yaitu rasio untuk mengukur hasil yang diterima pemegang saham biasa dari perusahaan dibandingkan dengan investasi yang ditanamkan pada awalnya melalui. Rasio ini dihitung dengan membagi laba setelah pajak dengan ekuitas di saham biasa.
- g. *Earning Per Share*, yaitu rasio keuangan untuk mengukur pendapatan bersih milik perusahaan terhadap jumlah rata-rata lembaran saham yang beredar dan pendapatan bersih akan dikurangi dengan saham preferen.

Setiap perusahaan pada akhirnya ingin memperoleh keuntungan yang maksimal. Ketika perusahaan memperoleh keuntungan (laba) yang maksimal sesuai dengan target maka akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingan (Kasmir, 2014). Profitabilitas menjadi salah satu pertimbangan dalam mengungkapkan informasi lingkungan karena pihak-pihak terkait juga akan melihat pengungkapan lingkungan melalui kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin besar sumber daya yang dimiliki sehingga perusahaan akan semakin mudah dalam melakukan pengungkapan lingkungan dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Dewi dan Yasa, 2017).

6. Leverage

Leverage adalah sumber dana yang digunakan perusahaan sehingga menimbulkan beban keuangan (Purnama, 2018). *Leverage* menunjukkan penggunaan sumber dana berupa utang untuk membiayai operasional perusahaan (Nurhayati dan Kurniati, 2019). Menurut Mechedes dan Sri (2016), informasi *leverage* memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki sehingga perusahaan dapat melihat tingkat resiko suatu utang.

Leverage diukur dengan DER. DER merupakan rasio yang membandingkan total utang dengan total ekuitas (Purnama, 2018). Tingkat *leverage* tergambar dalam perjanjian antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham dan pemegang obligasi (Mutmainah dan Indrasari, 2017). Manajemen perusahaan akan mempertimbangkan tingkat *leverage* tersebut ketika akan melakukan

pengungkapan lingkungan (Maulana dkk, 2021). Dengan demikian, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengungkapkan informasi lingkungan agar kepercayaan kreditur tidak berkurang.

Menurut Brigham dan Houston (2010) menjelaskan bahwa rasio *leverage* meliputi:

- a. *Debt Ratio*, rasio ini terdiri dari 2 indikator yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). DAR yaitu rasio keuangan yang membagi total hutang terhadap total aset, sedangkan DER yaitu rasio keuangan yang membagi total hutang terhadap total ekuitas.
- b. *Times Interest Earned*, yaitu rasio keuangan yang membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan biaya atau beban bunga.
- c. *EBITDA Coverage Ratio*, yaitu rasio keuangan yang membandingkan EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) dan pembayaran sewa bisnis dengan jumlah agregat pembayaran pinjaman dan sewa.

Semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin rendah tingkat pengungkapan lingkungannya. Hal ini dikarenakan perusahaan akan mendapatkan resiko lebih tinggi apabila mengungkapkan informasi lingkungan (Purnama, 2018). Apabila perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan maka akan membutuhkan biaya yang lebih besar dari para kreditur sehingga utang yang dimiliki akan semakin banyak. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih untuk melunasi kewajibannya daripada mengungkapkan informasi lingkungan yang dapat menyebabkan

perusahaan akan semakin diawasi oleh para kreditur (Paramitha dan Rohman, 2014).

7. Umur Perusahaan

Umur perusahaan adalah lamanya suatu perusahaan berdiri (Paramitha dan Rohman, 2014). Perusahaan dengan umur yang lebih panjang memiliki pengalaman yang banyak dalam menerbitkan laporan tahunannya. Selain itu, perusahaan juga lebih memahami kebutuhan para pemangku kepentingan dan masyarakat melalui informasi yang didapatkan (Ciriyani dan Putra, 2016).

Umur perusahaan diukur dari tahun pertama perusahaan terdaftar di BEI sampai dengan tahun penelitian. Hal ini dikarenakan apabila perusahaan telah terdaftar di BEI maka perusahaan tersebut merupakan perusahaan publik dan akan memiliki pertanggungjawaban lingkungan (Ciriyani dan Putra, 2016). Perusahaan yang telah lama berdiri memiliki lebih banyak pengalaman dalam memenuhi kebutuhan para *stakeholders*. Karena perusahaan akan mendapatkan tuntutan yang lebih untuk mengungkapkan segala aktivitas perusahaan termasuk pengungkapan lingkungan secara lengkap (Arifianata dan Wahyudin, 2016).

Semakin tua sebuah perusahaan berdiri maka akan semakin luas informasi lingkungan yang diungkapkan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan lebih memahami informasi apa yang harus diungkapkan sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan sendiri. Dengan demikian, aktivitas perusahaan dapat diterima oleh publik agar perusahaan dapat menjaga eksistensinya. (Paramitha dan Rohman, 2014).

8. Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola kinerja lingkungan dengan baik (Suratno et al, 2006). Kinerja lingkungan merupakan usaha perusahaan untuk menjaga dan meminimalisir dampak kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan (Noviani dan Suardana, 2019). Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan melalui kepedulian terhadap bumi untuk mencegah kerusakan lingkungan. Pencegahan kerusakan lingkungan diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, menanam kembali hutan yang gundul, tidak membuang limbah pabrik ke laut dan melakukan terasering.

Kinerja lingkungan diukur dengan PROPER. PROPER atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu upaya yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungan. Dalam PROPER peringkat warna yang digunakan sebagai bentuk komunikatif penyampaian kinerja lingkungan kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami dan diingat (Hafid dan Wahyudin, 2020). Semakin tinggi nilai PROPER yang di dapat maka pengungkapan lingkungan yang dinilai juga akan semakin tinggi (Sari dkk, 2018). Peserta PROPER bersifat selektif yaitu ditujukan kepada perusahaan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan (Noviani dan Suardana, 2019).

Kinerja lingkungan dapat menggambarkan kondisi lingkungan di sekitar perusahaan. Kinerja lingkungan dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk mendorong perusahaan menaati peraturan perundang-undangan dan menerapkan produksi bersih (*cleaner production*).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Purnama (2018) Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, Vol. 27 No. 8 : 763-773	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Environmental Performance</i> Variabel Dependen: <i>Environmental disclosure</i>	Profitabilitas dan Leverage tidak berpengaruh terhadap <i>Environmental disclosure</i> , sedangkan Ukuran perusahaan dan Environmental performance berpengaruh positif terhadap <i>Environmental disclosure</i>
2	Sari dkk (2018) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol. 9 No. 3 : 145-155	Variabel Independen: Kepemilikan manajerial, Proporsi dewan komisaris, Ukuran Komite Audit, Profitabilitas, Kinerja Lingkungan Variabel Dependen: <i>Environmental disclosure</i>	Kepemilikan manajerial, Ukuran komite audit, Kinerja lingkungan berpengaruh positif <i>Environmental disclosure</i> , sedangkan Proporsi dewan komisaris dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Environmental disclosure</i>
3	Dewi dan Yasa (2017) E-Jurnal Akuntansi, Vol. 20 No. 3 : 2362-2391	Variabel Independen: Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri, Kinerja Lingkungan Variabel Dependen: <i>Environmental disclosure</i>	Ukuran perusahaan , Tipe industri dan Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap <i>Environmental disclosure</i> , sedangkan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Environmental Disclosure</i>
4	Noviani dan Suardana (2019) E-Jurnal Akuntansi, Vol. 28 No. 3 : 1904-1919	Variabel Independen: Ukuran perusahaan, <i>Political cost</i> , Kinerja Lingkungan Variabel Dependen: <i>Environmental disclosure</i>	Ukuran perusahaan , <i>Political cost</i> dan Kinerja Lingkungan berpengaruh positif terhadap <i>Environmental Disclosure</i>
5	Chanifah dkk (2019) Jurnal Widyakala, Vol. 6 No. 1 : 45-54	Variabel Independen: Kinerja lingkungan, Kinerja keuangan Variabel Dependen: Pengungkapan informasi lingkungan	Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan informasi lingkungan, sedangkan Kinerja Keuangan berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan informasi lingkungan
6	Nugraha dan Juliarto (2015)	Variabel Independen:	Ukuran perusahaan , Tipe industri, Kinerja lingkungan

	Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 4 No. 4 : 1-15	Ukuran perusahaan, Tipe industri, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Kinerja Lingkungan Variabel Dependen: <i>Environmental disclosure</i>	berpengaruh positif terhadap <i>Environmental disclosure</i> , sedangkan Profitabilitas dan Leverage berpengaruh negatif terhadap <i>Environmental Disclosure</i>
7	Ijma dkk (2018) E-Jurnal Katalogis, Vol. 6 No. 4 : 1-9	Variabel Independen: Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Porsi kepemilikan publik Variabel Dependen: <i>Environmental disclosure</i>	Ukuran perusahaan dan Porsi kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap <i>Environmental disclosure</i> , sedangkan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Environmental disclosure</i>
8	Sari dkk (2019) Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 1 No. 1 : 18-34	Variabel Independen: Kepemilikan institusional, Proporsi Komite Audit Independen, Kinerja lingkungan Variabel Dependen: Pengungkapan lingkungan	Kepemilikan institusional, Proporsi komite audit independen dan Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan lingkungan
9	Sutadipraja dkk (2020) Jurnal Mala'bi STIE Yapman, Vol. 3 No. 1 : 6-12	Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> , Kinerja Keuangan, Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Environmental disclosure</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>Environmental disclosure</i> , sedangkan Kinerja Keuangan dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Environmental Disclosure</i>
10	Hafid dan Wahyudin (2020) Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, Vol. 16 No. 2 : 89-104	Variabel Independen: Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas Variabel Dependen: Pengungkapan lingkungan Variabel Moderasi: Kinerja lingkungan	Ukuran perusahaan , Leverage dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan lingkungan Kinerja lingkungan memoderasi Leverage terhadap Pengungkapan lingkungan Kinerja lingkungan tidak memoderasi Ukuran perusahaan dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan lingkungan
11	Putra dan Utami (2017) Jurnal Akuntansi, Vol. 9 No. 1 : 1-11	Variabel Independen: <i>Environmental performance</i> Variabel Dependen: <i>Environmental disclosure</i> , <i>Economic performance</i>	<i>Environmental performance</i> berpengaruh positif terhadap <i>Environmental disclosure</i> dan <i>Economic Performance</i>
12	Elshabay (2018) Journal of Business and Retail Management	Variabel Independen: <i>Firm size</i> , <i>Firm age</i> , <i>Firm Leverage</i> , <i>Firm Profitability</i>	Firm size dan Firm leverage tidak berpengaruh terhadap <i>Environmental disclosure</i>

	Research, Vol. 12 No. 2 : 232-241	Variabel Dependen: <i>Environmental disclosure</i>	<i>Firm age</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Environmental disclosure</i> <i>Firm profitability</i> berpengaruh positif terhadap <i>Environmental disclosure</i>
13	Julekhah dan Rahmawati, (2019) Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 3 No. 1 : 50-66	Variabel Independen: Media exposure, Sensivitas industri, Kepemilikan asing, Kepemilikan publik, Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Environmental disclosure</i> Variabel Asing: Nilai perusahaan	Sensivitas industri dan Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap <i>Environmental disclosure</i> Media exposure, Kepemilikan asing, Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Environmental disclosure</i> <i>Environmental disclosure</i> tidak berpengaruh terhadap Nilai perusahaan
14	Abubakar (2017) Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 8 No. 21 : 31-35	Variabel Independen: <i>Firm size, Leverage, Profitability, Board size</i> Variabel Dependen: <i>Environmental disclosure</i>	<i>Firm size</i> dan <i>Profitability</i> berpengaruh positif terhadap <i>Environmental disclosure</i> <i>Leverage</i> dan <i>Board Size</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Environmental disclosure</i>
15	Andrikopoulos dan Kriklani (2013) Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Vol. 20 No. 1 : 55-64	Variabel Independen: <i>Firm size, Profitability, Market to book ratio, Leverage</i> Variabel Dependen: <i>Environmental disclosure</i>	<i>Firm size</i> dan <i>Market to book ratio</i> berpengaruh positif terhadap <i>Environmental disclosure</i> <i>Profitability</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Environmental disclosure</i>

C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan menjadikan teori tersebut sebagai acuan dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya. Pentingnya teori ini adalah karena berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan secara berkelanjutan sehingga perusahaan dapat tetap eksis dalam kehidupan bisnis (Chanifah dkk, 2019). Dalam analisis perilaku organisasinya perusahaan juga memerlukan legitimasi dari masyarakat agar keberadaan perusahaan diakui di

masyarakat. Harapan dan keinginan masyarakat harus sejalan dengan harapan dan keinginan masyarakat karena apabila terdapat perbedaan maka perusahaan tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Purnama, 2018).

Perusahaan dengan aset yang besar akan semakin dikenal publik dan dituntut untuk melaporkan tanggung jawab lingkungannya (Noviani dan Suardana, 2019). Biaya dalam mengungkapkan informasi lingkungan dapat ditentukan melalui ukuran perusahaan (Hafid dan Wahyudin, 2020). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak informasi lingkungan yang diungkapkan. Hal ini sesuai dengan teori *stakeholder* bahwa perusahaan yang besar akan menjadi sorotan bagi para pemangku kepentingan terutama untuk mengawasi sumber daya perusahaan (Nugraha dan Juliarto, 2015).

Kemudian, untuk tetap menjaga eksistensinya perusahaan harus menghasilkan laba yang maksimal agar memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingan (Kashmir, 2014). Perusahaan dapat melihat kinerja keuangan melalui profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Ijma dkk, 2019). Semakin tinggi profitabilitas maka semakin lengkap informasi lingkungan yang diungkapkan. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi, bahwa perusahaan akan mendapatkan tekanan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan dimana perusahaan beroperasi sehingga perusahaan perlu untuk melakukan pengungkapan lingkungan sebagai bentuk jawaban atas tuntutan tersebut dan perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Nugraha dan Juliarto, 2015).

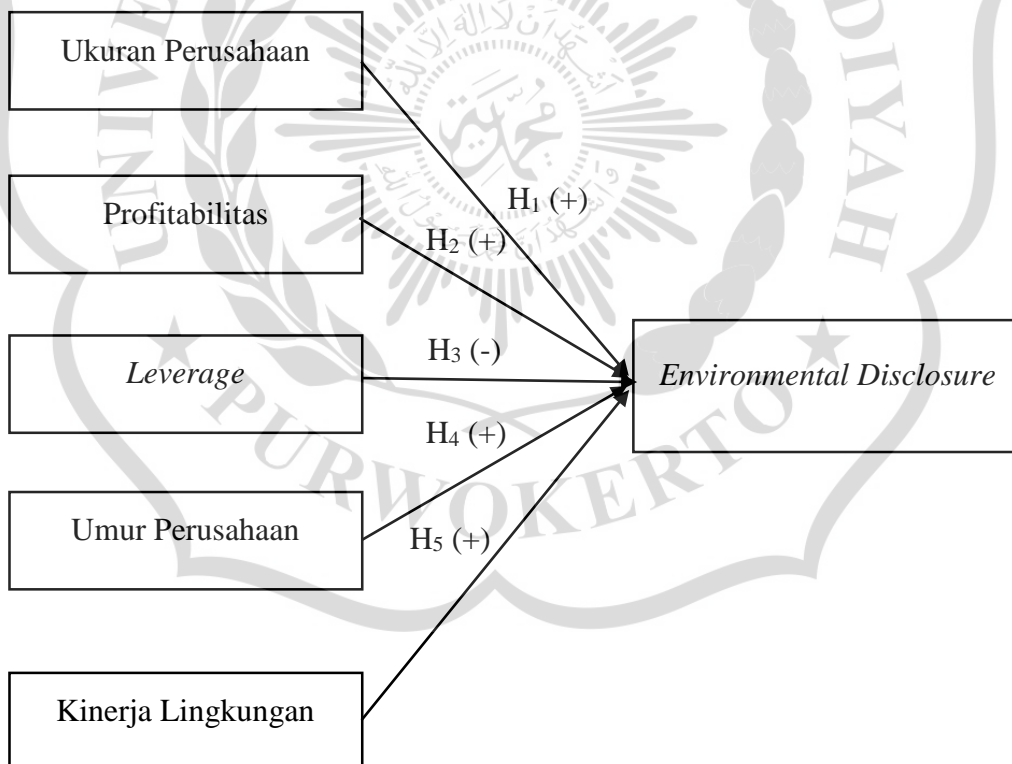
Perusahaan juga memerlukan biaya untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Sumber dana yang didapatkan perusahaan untuk biaya tersebut salah satunya adalah dari para kreditur. Presentase penggunaan sumber dana tersebut dapat dilihat melalui tingkat *leverage* perusahaan (Hafid dan Wahyudin, 2020). Semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin rendah pengungkapan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan teori *stakeholder*, bahwa apabila perusahaan memiliki kewajiban yang besar kepada kreditur maka semakin besar tanggung jawab lingkungan yang dilakukan. Pengungkapan lingkungan tersebut akan lebih banyak mengeluarkan biaya sehingga kewajiban perusahaan akan bertambah. Dengan demikian, perusahaan akan lebih memilih untuk melunasi kewajibannya dibandingkan melakukan pengungkapan lingkungan (Maulana dkk, 2021).

Lamanya perusahaan berdiri memberikan gambaran bahwa perusahaan mempunyai banyak pengalaman dalam menghadapi hambatan yang ada. Perusahaan dengan umur yang lebih panjang menunjukkan bahwa mereka tetap bertahan dalam waktu yang lama untuk menjaga kelangsungan bisnis perusahaan. Semakin lama umur perusahaan maka pengungkapan lingkungan yang dilaporkan akan semakin luas. Pernyataan tersebut sejalan dengan teori legitimasi, bahwa perusahaan yang berdiri lama cenderung akan tetap mengungkapkan informasi lingkungannya karena perusahaan akan sudah mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Ciriyani dan Putra, 2016).

Selanjutnya, perusahaan akan memperhatikan kinerja lingkungannya. Kinerja lingkungan menunjukkan kinerja perusahaan dalam mengelola dan

menjaga lingkungannya. Semakin baik kinerja lingkungan suatu perusahaan maka semakin banyak informasi lingkungan yang diungkapkan. Sejalan dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan kinerja lingkungan dengan baik sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan (Sari dkk, 2019).

Dalam penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, umur perusahaan, dan kinerja lingkungan. Hubungan lima variabel independen tersebut dalam mempengaruhi *environmental disclosure* dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure*

Perusahaan besar lebih banyak disoroti karena pihak eksternal akan melihat hasil operasi perusahaan dari pengungkapan yang dilakukan (Purnama, 2018). Modal yang banyak dan total aset yang tinggi akan semakin memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengekstraksi alam secara besar-besaran. Hal ini menyebabkan perusahaan harus melakukan praktik *environmental disclosure* dalam rangka menutupi masalah dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sesuai dengan teori legitimasi, dimana perusahaan besar lebih dikenal masyarakat karena perusahaan dituntut untuk memenuhi pengungkapan lingkungannya (Noviani dan Suardana, 2019).

Kemudian, perusahaan yang besar juga akan mendapatkan tekanan dari masyarakat karena masyarakat ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Hackson dan Milne (1996) bahwa perusahaan lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga memberikan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan dan *stakeholder* semakin tertarik terhadap program lingkungan yang dijalankan oleh perusahaan. Perusahaan besar akan mendapatkan perhatian lebih dari publik sehingga perusahaan berupaya mengungkapkan lebih banyak informasi lingkungan kepada para pemangku kepentingan perusahaan (Suhardjanto, 2010).

Purnama (2018), Hadjoh dan Sukartha (2013), Ardi dan Yulianto (2020), dan Effendi (2018) menemukan pengaruh positif antara ukuran perusahaan dengan

environmental disclosure. Perusahaan yang lebih besar akan memiliki informasi lingkungan lebih banyak daripada perusahaan yang lebih kecil. Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* bahwa para pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk mengontrol sumber daya perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

2. Pengaruh profitabilitas terhadap *environmental disclosure*

Profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Paramitha dan Rohman, 2014). Menurut Sutadipraja dkk (2020) profitabilitas dapat didefinisikan sebagai usaha perusahaan dalam menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan untuk menarik investor. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih mudah untuk melakukan pengungkapan lingkungan karena perusahaan memiliki sisa anggaran dari operasional perusahaan. Berdasarkan teori legitimasi, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka perusahaan akan semakin mudah melakukan pengungkapan lingkungan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Nugraha dan Juliarto, 2015).

Ahmadi dan Bouri (2017), Aulia dan Agustina (2015), Solikhah dan Winarsih (2016), Suhardjanto dan Miranti (2007) menemukan pengaruh positif antara profitabilitas dengan *environmental disclosure*. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin luas pengungkapan informasi lingkungannya (Sari

dkk, 2018). Apabila perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan secara luas maka perusahaan dapat menjaga eksistensinya di masyarakat dan profitabilitas yang dihasilkan juga akan semakin tinggi (Julekhah dan Rahmawati, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

3. Pengaruh *leverage* terhadap *environmental disclosure*

Leverage adalah indikator untuk melihat seberapa besar dana yang diberikan kreditur untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam penggunaan biaya operasional perusahaan (Kurniawan, 2019). *Leverage* merupakan gambaran besarnya utang perusahaan untuk membiayai investasinya (Purnama, 2018). Teori *stakeholder* menyatakan bahwa semakin tinggi *leverage* maka tanggung jawab perusahaan kepada kreditur akan semakin besar sehingga perusahaan memilih untuk melunasi kewajibannya daripada mengungkapkan informasi lingkungan. Hal tersebut dikarenakan apabila rasio hutang tinggi maka perusahaan tidak mempunyai anggaran dan akan mengurangi pengeluaran yang salah satunya adalah pengeluaran dalam mengungkapkan informasi lingkungan.

Perusahaan juga harus mengeluarkan biaya yang besar apabila melakukan pengungkapan lingkungan (Nugraha dan Juliarto, 2015). Tekanan dari kreditur juga menjadi alasan perusahaan lebih memilih melunasi kewajibannya dan tidak melakukan pengungkapan lingkungan untuk menghemat biaya (Hilmi dan Rinanda, 2020). Dengan demikian, perusahaan perlu mengelola keuangannya agar dapat mengatasi biaya yang dikeluarkan.

Suhardjanto dan Miranti (2007), Chandok dan Singh (2017), Aulia dan Agustina (2015) menemukan pengaruh negatif antara *leverage* dengan *environmental disclosure*. Semakin tinggi *leverage* maka perusahaan akan semakin cenderung tidak mengungkapkan informasi lingkungan. Perusahaan dengan *leverage* tinggi akan mengurangi pengungkapan lingkungan agar tidak mendapat perhatian dari para kreditur. Karena rendahnya informasi lingkungan yang diungkapkan akan mengakibatkan berkurangnya legitimasi masyarakat terhadap perusahaan (Purnama, 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*

4. Pengaruh umur perusahaan terhadap *environmental disclosure*

Umur perusahaan adalah lamanya suatu perusahaan berdiri (Paramitha dan Rohman, 2014). Umur perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang dapat mengancam kehidupan perusahaan. (Arifianata dan Wahyudin, 2016). Semakin lama perusahaan beroperasi maka dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akan semakin banyak. Dampak terhadap lingkungan tersebut akan mengakibatkan sorotan bagi masyarakat karena berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan perusahaan harus mengungkapkan informasinya agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Sejalan dengan teori legitimasi, dimana perusahaan dipandang sebagai suatu organisasi yang memberikan apa yang diinginkan masyarakat dan sebaliknya.

Perusahaan dengan umur panjang merupakan perusahaan yang bertahan cukup lama dalam kehidupan bisnis. Legitimasi masyarakat menjadi alasan kelangsungan hidup yang terus berlanjut sehingga perusahaan akan berusaha memenuhi apa yang menjadi harapan dalam masyarakat (Ciriyan dan Putra, 2016).

Menurut Rahmawati dan Budiwati (2018), Ciriyan dan Putra (2016) menemukan pengaruh positif antara umur perusahaan dengan *environmental disclosure*. Semakin lama perusahaan dapat bertahan maka semakin luas pengungkapan lingkungan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan akan mendapatkan legitimasi mengenai keberadaannya di masyarakat sehingga keberlangsungan perusahaan dapat terus berlanjut. Dengan demikian, perusahaan akan terus berusaha dan belajar dalam menghadapi masalah sesuai dengan pengalaman yang didapatkan (Rahmawati dan Budiwati, 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

5. Pengaruh kinerja lingkungan terhadap *environmental disclosure*

Kinerja lingkungan adalah kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitasnya dengan memperhatikan lingkungan (Rohmah dan Wahyudin, 2015). Menurut Sari dkk (2019) kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan terkait lingkungan dengan melakukan kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Berdasarkan teori *stakeholder*, dalam rangka menjaga komunikasi dan hubungan dengan masyarakat dan *stakeholder* maka perusahaan akan melakukan kinerja lingkungannya melalui pengungkapan lingkungan (Akhsa

dan Darsono, 2021). Menurut Sari (2019) kinerja lingkungan perusahaan diukur menggunakan PROPER yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Environmental disclosure merupakan bentuk praktik pelaporan kinerja lingkungan perusahaan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). *Voluntary disclosure* merupakan bentuk pengungkapan yang bersifat sukarela yang apabila dilakukan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi *stakeholders*. Hal ini sejalan dengan pendapat Burgwal dan Vieira (2014) bahwa perusahaan yang menerapkan *voluntary disclosure* salah satunya berupa kinerja lingkungan yang tinggi akan mengungkapkannya kepada *stakeholders* agar mengurangi asimetri informasi. Oleh karena itu, apabila perusahaan mempunyai kinerja lingkungan yang tinggi maka akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menunjukkan sesuatu hal di luar kinerja keuangan yang dapat menaikkan nilai perusahaan.

Sari dkk (2019), Chanifah dkk (2019), Sari dkk (2018), Dewi dan Yasa (2017) menemukan pengaruh positif antara kinerja lingkungan dengan *environmental disclosure*. Perusahaan akan mengungkapkan informasi lingkungan apabila melakukan kinerja lingkungan dengan baik (Sari, 2019). Pengungkapan dinilai sebagai informasi perusahaan kepada *stakeholdernya* (Nugraha dan Juliarto, 2015). Semakin tinggi kinerja lingkungan perusahaan maka informasi yang diungkapkan akan semakin banyak (Yendrawati dan Tarusnawati, 2013). Hal tersebut merupakan bentuk transparansi perusahaan agar masyarakat dan para pemangku kepentingan mengetahui tanggung jawab lingkungan yang telah

dilakukan (Suratno, 2006). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₅: Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*

